



ISSN 2685-483X
Volume 3, Issue 1, Januari-Juni 2021
Halaman 15-27



Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia

Djilzaran Nurul Suhada
Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Kata Kunci	Abstrak
Feminis Kesetaraan Gender Perempuan Laki-Laki	Feminis seringkali dipahami sebagai gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam memperjuangkan ketidak-adilan gender. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ketidak-adilan gender hanya merugikan kaum perempuan karena selalu berada di bawah dominasi laki-laki yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya, stereotipe yang hadir karena mengakarnya budaya patriarki telah membuat peran gender yang dikonstruksikan menyulitkan kedua belah pihak. Feminis sudah seharusnya tidak hanya mengandalkan kekuatan perempuan dalam upaya pembebasan diri dari belenggu patriarki, namun juga dibutuhkan peran laki-laki untuk mendukung keberlangsungan gerakan tersebut, karena bagaimanapun untuk mewujudkan kesetaraan gender dibutuhkan keterlibatan perempuan dan laki-laki di dalamnya. Maka gerakan sosial dengan paham feminis yang diinisiasi oleh kaum laki-laki, sangat dinantikan kehadirannya agar masyarakat dapat memiliki sudut pandang kesetaraan yang tidak menilai seseorang hanya berdasar gender, laki-laki atau perempuan, melainkan melihatnya sebagai manusia seutuhnya yang berhak memperjuangkan hidup. Inilah saatnya perempuan dan laki-laki bersatu dalam melawan tindakan opresi, dominasi, diskriminasi dan kekerasan yang dapat terjadi pada siapa saja.
Naskah Awal	14 Januari 2021
Review	21 April 2021
Revisi	5 Mei 2021
Naskah Diterima	19 Mei 2021
Publikasi	30 Juni 2021



ISSN 2685-483X
Volume 3, Issue 1, Januari-Juni 2021
Pages 15-27



Feminism in the Dynamics of The Struggle for Gender Equality in Indonesia

Djilzaran Nurul Suhada
Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Keywords	Abstract
Feminist Gender Equality Women Men	Feminists are often understood as a movement carried out by women in fighting for gender inequality. Most people think that gender inequality only harms women because they are always under the domination of men which results in the narrow space for women to move in social life. But in reality, the stereotypes that exist due to the roots of a patriarchal culture have made the gender roles constructed make it difficult for both parties. Feminist should not only rely on the power of women in an effort to free themselves from the shackles of patriarchy, but also need the role of men to support the continuation of the movement, because however to realize gender equality requires the involvement of women and men in it. So social movements with feminist ideology initiated by men are very awaited so that society can have an equality perspective that does not judge a person based just on gender, male or female, but sees them as a whole human being who has the right to fight for life. This is the time for women and men to unite in fighting against acts of oppression, domination, discrimination and violence that can happen to anyone.
Submission	14 Januari 2021
Review	21 April 2021
Revision	5 Mei 2021
Acceptance	19 Mei 2021
Publication	30 Juni 2021

Pendahuluan

Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali hadir dan berdiri di Middelburg, salah satu kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Setelah abad ke-19, feminisme berkembang menjadi sebuah gerakan yang banyak mendapat perhatian dari perempuan-perempuan kulit putih Eropa. Perjuangan perempuan-perempuan tersebut didasari oleh apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*. Kata feminisme pertamakali tercetus oleh Charles Fourier yang merupakan seorang aktivis sosialis utopis pada tahun 1837. Selanjutnya, gerakan ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak John Stuart Mill melakukan publikasi mengenai *The Subjection of Women* (1869), yang dimana gerakan ini menandai kehadiran feminisme gelombang pertama dan akan berlanjut pada gelombang-gelombang selanjutnya (Kristeva, 2015).

Dengan munculnya gerakan-gerakan perempuan di Eropa dan Amerika, turut berpengaruh pada situasi dan kondisi politik pergerakan perempuan di Indonesia yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh kelas atas seperti Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien dan masih banyak lagi yang lain. Semua gerakan-gerakan perempuan Indonesia penyebabnya didominasi oleh kondisi-kondisi yang mengharuskan mereka untuk berjuang bersama kaum laki-laki dalam menjaga dan mempertahankan tanah leluhur, meskipun mereka berbeda dari segi sex dan gender.

Adanya perbedaan seks tentu akan melahirkan perbedaan gender dengan perannya masing-masing. Peran gender hadir sebagai konsekuensi di tengah masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam artian, perempuan memiliki organ produksi secara lahiriyah, hamil, melahirkan, menyusui (sex), lalu kemudian perempuan tersebut memiliki peran yang sangat melekat pada dirinya, seperti merawat, mengasuh, mendidik anak (gender). Namun yang menjadi persoalan dan perlu untuk digugat oleh perempuan itu ialah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut. Dalam konteks perempuan sebagai istri, peran gender jelas tidak dapat dilepaskan dari relasi atau hubungan antara istri dan suami didalam keluarga yang didalamnya terkandung dua peran; (1) *Public Role* atau peran publik dan (2) *Domestic Role* atau peran domestik (Djulkarnain, 2015).

Peran publik biasanya diartikan sebagai wilayah aktualisasi diri para kaum lelaki (Suami), dan peran domestik merupakan dianggap tempat perempuan atau bahkan dunia kaum perempuan. Sekat budaya tersebut merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang memisahkan antara tugas laki-laki sebagai pemburu dan perempuan bertugas sebagai peramu. Selanjutnya, budaya-budaya inilah yang berhasil terwariskan kepada penduduk agraris, yang dimana lelaki menempatkan dirinya diluar rumah (*Public Sphere*) entah untuk mengelola pertanian atau berbisnis, lalu perempuan ditempatkan didalam rumah (*Domestic Sphere*) dengan segala tugasnya yang sudah jelas kita tahu.

Sekat peran yang sebetulnya dikonstruksikan masyarakat ini, mau tidak mau mempersempit gerak langkah perempuan dan menambah beban laki-laki. Bagaimana tidak, ketika istilah *Dapur, Sumur, Kasur* yang selalu melekat dan ditunjukan kepada kaum perempuan membumi di pedesaan Jawa Barat. Ini berarti para perempuan seakan dihalang-halangi untuk maju, termasuk dalam akses pendidikan. Dapur, sumur, kasur merupakan representasi dari ranah domestik dalam rumah tangga. Masyarakat tradisional sepakat bahwa pendidikan bagi perempuan hanya akan berakhir sia-sia karena tidak akan terpakai saat suari hari nanti mereka menikah. Perempuan berpendidikan tinggi juga akan cenderung dihindari oleh laki-laki karena takut mereka akan mendominasi. Padahal sejak tahun 60-an Gerwani telah berdiri sebagai organisasi yang berperan meningkatkan kesadaran petani perempuan, kerjasama dengan Buruh Tani Indonesia bahkan membuat banyak seminar yang membahas pendidikan hingga upaya mendorong penghapusan rodi yang berlaku di desa-desa. Bahkan jauh sebelum itu, pada tahun 1919 Nyai Ahmad Dahlan bersama Aisyiyah mendirikan Taman Kanak-Kanak yang hingga kini telah berkembang mencapai 5865 sekolah (Mardiasih, 2019).

Dari bukti sejarah tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak sekali peran perempuan yang juga menguntungkan bagi kaum laki-laki hari ini. Lalu bagaimana pembagian peran ini menambah beban laki-laki? Selain stereotipe tentang perempuan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi, masyarakat juga menciptakan keadaan yang tidak memudahkan hidup laki-

laki. Anggapan bahwa laki-laki adalah sosok yang kuat, pemimpin yang hebat, tidak boleh cengeng dan sembarangan menangis, cukup membuat laki-laki harus selalu memaksakan kehendak orang-orang disekitarnya sesuai dengan harapan mereka. Pembagian tugas gender ini membuat laki-laki selalu mendapat tugas lebih berat dan harus dikerjakan sendiri seperti yang lumrah terjadi di masyarakat bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah untuk keberlangsungan anggota keluarganya. Akibatnya tanpa disadari laki-laki mendapat tekanan dan rentan akan depresi. Padahal hidup dengan bantuan perempuan bukanlah hal yang memalukan, mereka kini dapat bekerja sama sebagai partner dengan tidak mendominasi salah satunya (Muttaqin, 2014).

Sampai saat ini, feminisme hadir sebagai jalan untuk menghancurkan bias gender yang selama ini masih sangat mengakar dalam akal, pikiran serta tindakan masyarakat Indonesia. Selain pembagian peran yang merugikan kedua gender, sejauh ini juga sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum menyadari bahwa banyak sekali tindakan bahkan guyonan yang sekiranya dapat merendahkan atau memojokan suatu gender tertentu. Seperti berkata tidak pantas terhadap bentuk tubuh perempuan yang baru-baru ini menjadi guyonan komentator bola dengan kata-kata melecehkan berbarengan dengan gerak kamera yang menyorot sekumpulan penonton perempuan, serta kerap terdengar selentingan yang dilontarkan perempuan pada tubuh laki-laki, seperti yang dilakukan sejumlah penggemar atlet bulu tangkis Jonathan Christie pada kolom komentar media sosialnya dengan kata-kata "*rahim anget*" karena Jonathan melepas kaosnya sebagai sebuah selebrasi kemenangan di lapangan. Dari kedua contoh diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelecehan bukan hanya dapat terjadi kepada kaum perempuan saja, melainkan keduanya, namun sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya adalah sebuah pelecehan.

Lalu bagaimana bias gender masih saja mengakar dengan cukup kuat dan masih memerlukan perlawanan untuk menghancurkannya? Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Perempuan dan laki-laki sudah seharusnya dapat memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia, bukan atas dasar jenis kelaminnya.

Pembahasan

Kartini dan Suratnya

Diakhir abad ke-19, perempuan-perempuan muda banyak terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Bukan main-main, para perempuan muda itu dapat menjelma sebagai pemimpin pasukan dalam perlawanan tersebut. seperti contoh, Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan Martha Tiahahu yang ikut berjuang bersama kapitan Pattimura. Pada saat itu belum ada istilah atau gagasan kesetaraan gender dan belum sama sekali disadari. Para perempuan muda ini termasuk ke dalam golongan perempuan kelas atas atau bangsawan, dan bisa disebut *ningrat* karena status sosial yang melekat pada diri mereka. Mereka berjuang atas dasar kesadaran penuh karena kondisi sosial yang terjadi pada saat itu, bahkan kehilangan nyawa sekalipun tiak menjadi masalah baginya, seperti apa yang terjadi pada Martha Tiahahu yang rela meregang nyawa ditiang gantung (Kristeva, 2015).

Kartini hadir sebagai penerus perjuangan perempuan-perempuan muda sebelum dirinya, dengan surat-suratnya, membuktikan bahwa berjuang tidak harus selalu menggunakan metode angkat senjata untuk melawan ketidak-adilan. Kehidupan sosial masyarakat Jawa pada saat itu masih kental akan keteraturan dan tata krama. Adat ketimuran yang kuat merupakan aturan masyarakat yang dianggap sangat membelenggu ruang gerak kaum perempuan. "*Tangan dan kaki kami masih terbelenggu; masih terikat pada hukum, adat istiadat dan kebiasaan di Negeri kami.*" Sepenggal kata dari surat kartini yang ia kirimkan kepada sahabatnya Stella Zehandelaar, seorang feminis sosialis di Belanda. Cita-cita paling sederhana dari Kartini ialah meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan yang setara tanpa memihak dan mereformasi sistem perkawinan yang di dalamnya mengemukakan penolakan poligami karena dianggap merendahkan kaum perempuan (Mustikawati, 2015).

Surat-surat Kartini banyak yang sengaja dihancurkan, surat-surat tersebut berisikan

percakapan tertulis dengan Stella yang banyak menginspirasi Kartini mengenai permasalahan perempuan dan pembebasan. Secara tidak langsung, Kartini juga menyampaikan prihal penentangan terhadap dominasi kolonial kepada rakyat dari negeri terjajah. Pada saat itu, saat surat-surat Kartini tertulis, sentiment nasionalisme yang terorganisir belum muncul, juga tradisi menggunakan media surat kabar dan terbitan untuk menyebar luaskan propaganda juga belum populer. Pandangan Kartini terbentuk dari berbagai literatur bahasa Belanda yang ia baca dalam masa pingitannya, serta komunikasi dengan Stella melalui surat-suratnya merupakan bukti yang luar biasa bahwa Kartini, seorang perempuan yang terisolasi dan merasa sunyi itu mampu membangun suatu gagasan politik yang progresif hingga akhir hayatnya. Baik mengenai hak-hak perempuan maupun tentang masyarakat Bumi Putera yang terjajah (Kristeva, 2015).

Sesudah kematian Kartini, perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan terus berlanjut. Pringgodigdo membagi perjuangan kaum perempuan menjadi tiga gelombang; (1) Gelombang pertama yang terjadi antara tahun 1908 sampai dengan 1920, yang dimana pada gelombang pertama ini, perempuan berjuang untuk mendapatkan kedudukan sosial. (2) Gelombang kedua pada tahun 1920-1930, yang dimana kesadaran atas pemenuhan hak-hak perempuan mulai muncul dengan ditandai berkurangnya *kawin paksa* dan anak-anak perempuan diperbolehkan untuk mendapat pendidikan formal bahkan mampu membentuk kongres yang diberi nama Kongres Perempuan Indonesia dan diselenggarakan di Yogyakarta. (3) Gelombang ketiga muncul pada tahun 1930-1942, yang dimana perempuan Indonesia berhasil menetapkan Hari Ibu 22 desember melalui kongres yang terselenggara di Bandung pada tahun 1938 dengan semboyan "Merdeka Melaksanakan Darma". Sejak saat itu, perempuan Indonesia berhasil merumuskan cita-citanya sebagai Ibu Keluarga, Ibu Masyarakat dan Ibu Bangsa (Armiyati, 2015).

Namun, perjuangan tidak hanya sampai disitu saja, karena sampai saat ini hak-hak perempuan dan tuntutan akan kesetaraan harus terus diperjuangkan, mengingat masih banyak kalangan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Kartini dengan surat-suratnya secara tidak langsung mampu menjadi pelopor akan pentingnya kesetaraan dengan bukti banyaknya pergerakan-pergerakan perempuan yang terbentuk setelahnya.

Untuk Sekarang; Kesetaraan Atau Kesengsaraan?

Sejak Kartini mulai menulis dan mengirimkan surat-suratnya, disitulah Kartini menjukan bahwa perempuan layak mendobrak hal yang tabu, jika itu cenderung merugikan. Kartini berhasil menginspirasi generasi-generasi perempuan setelahnya melalui surat-surat yang dikompilasikan kedalam sebuah buku yang diberi judul "*Sehabis Gelap Terbitlah Terang*". Perjuangannya telah berhasil membuat perempuan terbebas dari belenggu, meskipun akan terus timbul belenggu baru bagi perempuan di masa modern dengan segala tantangannya dalam memperjuangkan kesetaraan.

Dominasi budaya maskulin di Indonesia sangat menentukan bagaimana seharusnya perempuan bersikap dan menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Perempuan modern saat ini sedikit dibutakan oleh kesetaraan yang sebenarnya, tanpa mereka sadari, mereka tetaplah berada di dalam bayang-bayang kekuasaan laki-laki. Mereka merasa bahwa perjuangan kesetaraan gender di periode sebelumnya sudah berhasil membuat kedudukan mereka sama dengan kaum laki-laki. Namun nyatanya, mereka tetap saja terjebak dalam peran domestik (*Domestic Role*) jika mereka sudah berada di dalam rumah. Contohnya, Mereka akan tetap lekat dengan peran ibu yang mengharuskan mereka untuk mengasuh anak, memasak untuk sang suami dan bebenah rumah setelah mereka pulang bekerja. Bahkan, terkadang dalam ruang publik sekalipun, perempuan masih saja dipandang demikian. Jadi mungkin saja kesetaraan gender masih sangat *utopis* di Indonesia.

Salah satu yang terparah ialah perempuan Aceh, yang dimana mereka harus rela dibelenggu oleh hukum adat maupun tafsir agama. Perempuan Aceh dibuat dan dibentuk menjadi makhluk yang tak bebas serta terpenjara dimanapun mereka berada, baik di rumah ataupun di luar rumah. Arif Syaifudin di dalam bukunya menuliskan tentang rencana pemerintah Aceh yang melarang perempuan untuk berboncengan dengan posisi mengangkang pada tahun

2012, dan hal itu sempat menjadi kontroversi. Perempuan sudah bukan “empu” bagi dirinya sendiri. Keadaan dipersulit oleh Negara, ketika belenggu-belenggu bagi perempuan Aceh tersebut seolah mendapatkan legitimasi penuh dari Negara (Syarifudin, 2020).

Nasib perempuan Aceh yang jika dapat diraba dan dilihat secara jelas, ternyata sama saja dengan nasib perempuan di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sudah bukan rahasia jika di Indonesia sendiri kini perempuan selalu menjadi objek, baik objek bagi media, kapitalisme dan industri (industri hiburan sampai industri produk kecantikan). Kegagalan kebudayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia semakin terlihat ketika masyarakat semakin tidak beradab. Masyarakat semakin terjebak dalam kebimbangan dan kebingungan menentukan standar moralitas serta sifat kemanusiaannya. Seperti contoh, banyak siaran televisi bahkan pentas hiburan di panggung desa-desa kecil yang menampilkan seorang penari perempuan dengan pakaian yang hampir telanjang. Disini terlihat bahwa moralitas menjadi sangat absurd dan ditentukan oleh opini publik, baik opini dari kelas dominan dan opini dari akar rumput. Dominasi wacana dari opini-opini tersebut yang dapat menentukan seseorang dapat dikatakan bermoral ataupun tidak. Industri hiburan di Indonesia seolah semakin gencar dan tak dapat dibendung lagi tindakannya menggunakan perempuan sebagai objek demi mendapatkan rating yang memuaskan bagi para penikmatnya (Syarifudin, 2020).

Pemerintah Indonesia terlihat gagap dan lamban dalam merespon modernisasi. Ditengah arus politik yang lumayan runyam, Negara turut ikut campur mengatur persoalan tubuh, terutama tubuh dari para perempuan. Pada tahun 2012, Soesilo Bambang Yudhoyono berhasil menetapkan Peraturan Presiden No.25 soal pembentukan Satgas Anti Pornografi dengan tujuan untuk menertibkan moralitas masyarakat agar tidak berotak porno dan mengurangi tindakan pelecehan seksual (Syarifudin, 2020). Mungkin bagi mereka itulah jalan agar permasalahan moral masyarakat dapat teratasi. Namun disini lain, seolah-olah perempuan dan tubuhnya yang merupakan penyebab permasalahan moral dapat terjadi. Negara memang mampu mengurus tubuh masyarakatnya, padahal ini bukan hanya menyoal moralitas namun juga soal hak dan eksploitasi.

Kegagalan Negara bukan hanya sampai situ saja, berbagai kasus yang menimpa perempuan seperti, pemerkosaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, merupakan dampak dari Negara yang kurang begitu menaruh perhatian pada kasus-kasus tersebut. seperti kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) yang kerap kali dapat terjadi dan hukum yang belum juga mampu mengakses permasalahan tersebut karena alasan yang sangat pribadi. Adapun ketika perempuan dihadapkan dengan peradilan akibat kasus hukum yang menimpanya, perempuan kerap kali mendapatkan respon negatif dan tidak jarang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Ini mengakibatkan banyaknya kasus pelecehan bahkan pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak melaporkan karena ketakutan perempuan akan label yang akan terbentuk dari masyarakat (Sihite, 2003).

Itulah sebabnya kenapa perjuangan soal kesetaraan harus selalu dianggap penting. Dari norma adat, hukum formal Negara dan kesalahpahaman menafsirkan agama masih menjadi pagar pembatas yang sangat kuat untuk perempuan terbebas dari belenggu-belenggu yang mengharuskan mereka rela terkurung tanpa mereka sadari. Kartini dan para penerusnya harus selalu jadi teladan, bahwa memang hak-hak kesetaraan wajib untuk didapatkan bagi semua gender, entah laki-laki, perempuan dan yang lainnya, tentunya dengan tantangan yang berbeda dan semakin rumit.

Media Masa dan Film

Seperti yang dapat kita saksikan selama ini, media turut andil dalam pembentukan opini masyarakat. Media bisa saja melakukan *framing* terhadap apapun yang terjadi untuk disampaikan kepada masyarakat, termasuk pembentukan identitas perempuan. Seperti yang sudah dikatakan di atas, kebanyakan media saat ini hanya mampu menampilkan perempuan sebagai objek yang menguntungkan. Baik media tradisional maupun media massa seperti Televisi, Instagram, Youtube dan lainnya, selalu saja berhasil menarik perhatian pengguna media secara umum, apalagi jika menyoal isu seksual atau video pribadi seseorang yang tidak sengaja tersebar.

Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan adegan panas selebriti perempuan dengan seorang pria, yang mana masyarakat dibuat geram oleh perilaku selebritis tersebut dan lagi-lagi Negara dan media seolah bersekongkol untuk mengompromi opini masyarakat dengan cara menyebut nama pemeran pria hanya berdasarkan inisial, sedangkan perlakuan berbeda diberikan terhadap pemeran perempuan, dengan jelas nama lengkapnya terpampang di berbagai headline portal berita, padahal keduanya sama-sama berkontribusi dalam pembuatan video itu. Media selalu berhasil mengeksploitasi tubuh perempuan, baik dalam industri iklan suatu produk maupun eksploitasi secara mental, menempatkan perempuan sebagai objek.

Dapat disadari atau tidak, media terlihat dengan senang hati menyuguhkan berita-berita seperti itu kepada khalayak umum. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan konten-konten erotis di banyak situs dan film, konten berisikan adegan ciuman bahkan bersenggama tak luput masuk kedalam ranah industri film dan iklan internet Nasional. Erotika media masa memang kerap kali menjadi pilihan karena memiliki kesempatan yang besar untuk memperoleh nilai-nilai kapital. Kemanapun media masa melarung berita-beritanya, hampir tidak akan lepas dari peran perempuan sebagai objek dalam konteks erotika media masa. Di tengah arus digital dan modernisasi, perempuan seolah diantarkan untuk rela dan mau menampilkan citra erotis daripada citra elegan, sopan, atau mungkin feminin karena didasari oleh alasan mencari nilai-nilai kapital seperti uang. Keadaan menjadi semakin lumrah karena gaji yang cukup besar akan dibayarkan kepada perempuan yang sanggup menjadi objek erotis di media masa, seperti iklan sabun, shampo, maupun iklan kondom (Syarifudin, 2020).

Posisi perempuan sebagai objek akan lebih diuntungkan jika perempuan itu mampu memenuhi syarat kecantikan yang dibuat oleh masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Baudrillard (2011) melalui bukunya yang berjudul Masyarakat Konsumsi, tentang kecantikan fungsional bahwa kecantikan adalah syarat mutlak, karena ia juga berfungsi sebagai modal (Baudrillard, 2011). Semakin mendekati standar cantik yang ditetapkan oleh masyarakat, maka semakin besar peluang perempuan tersebut untuk merepresentasikan nilai 'kehangatan' yang menjadi permintaan para konsumen dalam suatu produk. Sepertinya dalam hal ini pemikiran Simmel soal *The Philosophy of Money* (Ritzer & Goodman, 2009) memang relevan, bahwasanya uang dapat mereifikasi segalanya, mengubah segalanya berdasar nilai-nilai kuantitatif, termasuk perempuan dan tubuhnya dalam erotika media masa.

Namun di samping maraknya objektifikasi dan erotisme media, ada juga siaran televisi dan film yang seolah-olah ingin mengimbangi media masa yang selalu menjual perempuan layaknya pelacur di hadapan khalayak. Media-media tersebut seperti berusaha menyuarakan keberanian perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Seperti contoh film Aladdin yang merupakan produksi dari Disney, suatu film yang dibuat ulang dari animasi menjadi film Live-Action pada tahun 2019 lalu. Di dalam film Aladdin tersebut, kita dapat melihat bagaimana Sosok Putri Jasmine yang dibuat sangat gagah dan berani dalam balutan penampilan yang feminin. Putri Jasmine dibuat seperti kartini di masa lalu, yang dimana ia dengan berani berjuang dan melawan peran gender tradisional serta norma-norma patriarki, seperti menolak perjodohan, menolak gagasan bahwa perempuan tidak dapat menjadi seorang sultan serta menolak upaya dari lelaki untuk membungkam dirinya (Schiele, Louie, & Chen, 2020). Entah apa yang mendasari Disney menciptakan tokoh putri Jasmine menjadi seperti itu, namun ini cukup menjukan keberanian Disney menyuarakan hak-hak dari kaum perempuan melalui putri Jasmine dalam film Aladdin tersebut.

*I won't be silenced
You can't keep me quiet
Won't tremble when you try it
All I know is, I won't go speechless
Cause I'll breathe
When they try to suffocate me
Don't you underestimate me
Cause I know that I won't go speechless.*

(Penggalian lirik yang dinyanyikan Jasmine dari lagu speechless yang merupakan soundtrack film Aladdin)

Selain Disney dengan film Aladdin-nya, di Indonesia ada juga film yang menggambarkan begitu perkasanya perempuan dalam menjalani hidup. Seperti film Kartini dan Film Merry Riana. sebagaimana yang kita tahu soal Kartini yang berjuang melawan diskriminasi adat dan budaya Jawa pada saat itu, film Merry Riana juga tidak kalah menarik, menggambarkan bagaimana ia berjuang melawan tindak diskriminasi di Indonesia pada tahun 1998. Film sejenis Kartini dan Merry Riana tidak kalah hebatnya menyerukan bahwa memang perempuan adalah manusia, tak layak untuk ditempatkan di bawah kaum pria dan kaum-kaum lainnya. Ini membuktikan bahwa industri Film tanah air kadang kala memperhatikan isu-isu kesetaraan melalui kisah inspiratif yang mereka produksi.

Feminisme yang Tidak Berhenti Mencari Jalan Keluar

Sejarah Indonesia yang tidak luput dari jajahan bangsa-bangsa Eropa, membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan situasi dan kondisi yang menderita. Situasi dan kondisi tersebut membuat rakyat bumi putera harus rela berjuang mempertahankan tanah dan bangsanya di setiap daerah terjajah. Situasi dan kondisi seperti itu, lambat laun memunculkan pemikiran-pemikiran dari kaum perempuan untuk ikut bertindak dalam setiap langkahnya memperjuangkan kemerdekaan.

Seperti yang kita tahu, Kartini sudah lebih dulu menuangkan gagasannya kedalam surat-surat yang ia buat dan ia kirimkan kepada kawan-kawan sepemikirannya, meskipun di era sebelumnya ada beberapa perempuan muda yang turut berjuang mengangkat senjata bersama kaum laki-laki. Perjuangan perempuan dalam ikut sertanya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan kaumnya tak henti sampai di situ, dalam hasrat emansipasi nasional, terbentuklah organisasi perempuan pertama di Indonesia yang diberi nama Poetri Mardika pada tahun 1912. Poetri Mardika tidak sendiri dalam melakukan pergerakan, melainkan mereka terhubung dengan Boedi Utomo dalam kepentingan yang sama dan dengan gagasan nasionalis mereka. Hadirnya Poetri Mardika, membuat perkembangan yang cukup signifikan dalam penyuaran hak-hak perempuan, seperti banyaknya tulisan-tulisan yang menentang perkawinan terhadap anak di bawah umur dan poligami. Poetri Mardika juga seolah memberi inspirasi terhadap perempuan-perempuan dalam menyuarakan hak mereka, seperti munculnya kelompok perempuan Putri Sejati dan Wanita Utama, (Wieringa, 1988).

Perjuangan hak-hak perempuan dan juga feminisme, sangat bergantung pada situasi dan kondisi zaman yang dihadapi. Seperti pada era Orde Baru, dimana masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kondisi kerja yang menciptakan buruh-buruh di bidang tekstil, pertanian hingga pekerja migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan yang dikirim untuk bekerja ke luar negeri. Permasalahan pada tenaga kerja wanita, mulai timbul setelah era industrialisasi berkembang pesat di daerah perkotaan (Kiranantika, 2020b). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999 juga turut menambah masalah baru dalam sektor industri, yang mengakibatkan melonjaknya angka pengangguran sebesar 36 juta jiwa pada saat itu. Dari kondisi tersebutlah gerakan-gerakan feminisme Indonesia mulai hadir dan berkembang seperti pada tahun-tahun Poetri Mardika didirikan. Gerakan feminisme yang muncul pada saat itu, tidak hanya besuara mengenai hak-hak kaum perempuan atau tenaga kerja wanita, namun juga menyuarakan aspek-aspek sosial lainnya, seperti membela hak rakyat tak mampu dan anak-anak yang dimotori oleh Wardah Hafiz dan Ratna Sarumpaet (Djoeffan, 2001). Dari masa ke masa, perjuangan perempuan tak pernah luput dalam keikut sertaannya menyuarakan isu sosial ekonomi nasional, dan ini merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mementingkan hak dari kaumnya saja, melainkan hak semua orang.

Dimasa sekarang, lagi-lagi Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang begitu besar. Baik itu permasalahan dari dalam tubuh pemerintahannya sendiri, seperti korupsi, maupun permasalahan diakibatkan oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang kini dirasakan oleh sebagian besar Negara di dunia termasuk juga Indonesia. pada pertengahan bulan Januari 2020, Covid-19 dengan cepat menginfeksi lebih dari 193 Negara di dunia, sehingga Negara-negara yang terinfeksi tersebut harus menerapkan kebijakann *lockdown* dan *social distancing*. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya krisis dibidang kesehatan saja, namun juga ekonomi dan sosial yang juga ikut terdampak.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa perjuangan feminisme dalam menyuarkan kesetaraan turut dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang kerap dihadapkan kepada masyarakat. Di setiap situasi krisis, kelompok yang paling rentan merupakan kelompok marginal, seperti perempuan dan anak-anak. Dalam keadaan krisis, ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, diskriminasi serta kekerasan akan selalu hadir. Gadis Arivia dalam sebuah artikel tentang *Feminisme dan Covid-19*, menggambarkan data dari LBH APIK yang mencatat adanya 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual dari tanggal 16 maret hingga 30 maret 2020. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan yang hampir sama juga terjadi di India dan Afrika Barat (Arivia, 2020). Ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling dirugikan selama pandemi. Efek bergender seperti kesenjangan, ketimpangan dan diskriminasi hadir dan semakin memperburuk suasana.

Bahkan sebelum masa pandemi covid-19, status perempuan Indonesia belum juga mengalami peningkatan atau hampir tidak ada bedanya dari masa-masa sebelumnya. Masalah diskriminasi, eksploitasi, dominasi dan kekerasan masih kerap hadir menyelimuti peliknya permasalahan gender di Indonesia. Dan kini, pada masa pandemi, bidang *carework* yang didominasi oleh pekerja perempuan mengalami krisis besar yang disebabkan oleh pemerintah terlalu lama memarginalkan perempuan dan memandang sebelah mata kontribusinya pada sektor ekonomi (Kiranantika, 2020). Dapat kita ketahui, pada masa pandemi kebanyakan Negara bergantung pada *careworkers*, mayoritas perempuan yang bekerja dalam bidang keperawatan berada di garda terdepan dalam menghadapi permasalahan ini di rumah sakit. Sementara itu, dapat kita lihat di media masa serta internet, dokter yang mayoritasnya merupakan laki-laki mendapat perlakuan yang istimewa, tentu berbeda dengan perawat, termasuk dalam hal bayaran atau gaji. (Arivia, 2020)

Bukan hanya menggamblangkan permasalahan gender pada masa ini, Arivia juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan, ia menyebutkan bahwasanya menangani krisis tidak bisa hanya bersifat reaktif, tetapi sangat perlu adanya perubahan secara total. Solusi yang Arivia jelaskan ialah diantaranya, (1) *Feminist Power*, yang dimana pemimpin perempuan akan sangat faham mengenai pendekatan interseksionalitas dan telah mengaplikasikannya kedalam kebijakan-kebijakan mereka. Disini Arivia mengacu pada Jacinda Arden dari Swedia, Erna Solberg dari Norway, Katrin Jakobsdottir dari Islandia, Angela Markel dari Jerman, Tsa Ing-Wen dari Taiwan dan Sliveria Jacobs dari Caribia, yaitu tokoh-tokoh perempuan yangtelah berhasil merevisi sistem ekonomi yang berpusat pada pemilik modal dan ganti fokus pada pekerja *careworkers* yang dimana pekerja *careworkers* tersebut dianggap kelompok andalan penangkal krisis. (2) Kebijakan ekonomi yang harus menitik beratkan pada kinerja keperawatan atau *carework*. (3) Kebijakan yang mengandalkan cara pandang feminis, seperti contoh Menteri Audun Lysbakken yang lumayan mendukung akan pentingnya kebijakan pro-gender karena terkait pada kepentingan laki-laki. Audun melakukan kebijakan yang ersifat investasi kepada perempuan dan berhasil menciptakan ekonomi yang produktif. (4) Sistem pendidikan yang harus berbasis pada keadilan gender dan diversitas gender. Dalam situasi pandemi, hampir seluruh kegiatan belajar dan mengajar dialihkan dari tatap muka menjadi daring. Mayoritas pekerja pendidikan primer kebanyakan dari golongan perempuan yang mampu mengaplikasikan lensa interseksionalitas dalam kesenjangan pendidikan yang menerpa kelas masyarakat bawah pada masa krisis. (5) Perlu merubah sistem secara total, yang dikarenakan pandemi memaksa Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ekonomi, sosial dan kultural. Maka dari itu, menurut Arivia perubahan harus terjadi (Arivia, 2020).

Perjuangan feminisme selalu hadir hampir di dalam semua permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik di masa penjajahan kolonial, orde lama, orde baru, hingga pada masa sekarang. Dari Perjuangan Kartini sampai Arivia, merupakan bukti bahwa perempuan mampu lantang menyuarkan aspirasi mereka tentang kesetaraan bahkan tentang isu permasalahan sosial yang lain. Namun, adakah dari kalangan lelaki dan gender lain seperti golongan LGBTIQ yang ikut menyurakan kesetaraan seperti perempuan dalam pembahasan artikel ini? Pertanyaan tersebut akan terjawab pada pembahasan selanjutnya.

Romantisme Perjuangan

Sementara ini, banyak anggapan bahwa feminisme merupakan golongan perempuan yang memperjuangkan hak-hak dalam kesetaraan. Dari anggapan tersebut, sangat jarang sekali ditemui pandangan mengenai laki-laki yang juga bisa menjadi feminis. Bukankah jika ditarik dari sejarah bangsa Indonesia perempuan dan laki-laki sama-sama turut berjuang? Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan Martha Tiahahu yang tidak ragu turun ke medan perang membantu kaum laki-laki dan memperlihatkan bahwa seks maupun gender bukanlah hal yang berarti ketika itu. Perjuangan perempuan dan laki-laki sudah seharusnya bergerak berdampingan dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Pada gelombang feminisme ketiga, gagasan bahwa laki-laki harus ikut terlibat mulai muncul, lalu dilanjutkan oleh kampanye Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan bahwa laki-laki harus ikut terlibat dalam isu kesetaraan maupun keadilan gender yang dimana kampanye tersebut diberi tema *He For She*. Dari kondisi tersebut, laki-laki pro-feminis atau *Male Feminist* mulai terlihat dan dianggap sebagai konsekuensi dari pemikiran feminisme serta juga post-strukturalisme yang pada saat itu terlihat mulai berkembang. Jika kita telaah mengenai pola relasi gender yang sebenarnya turut menjadi akar permasalahan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, kita juga perlu menyadari bahwa ada lebih dari satu gender yang terlibat. Dalam pola relasi gender, sebenarnya bukan hanya kaum perempuan yang perlu dikeluarkan dan berjuang dari belenggu budaya patriarki, namun juga kaum laki-laki yang perlu diberi edukasi atau kesadaran agar tidak terus menerus terjebak dalam cara pandang lamanya (Larasati, 2019).

Feminisme dapat juga didefinisikan sebagai tindakan yang harus dilakukan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi dan juga penindasan yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin (Kiranantika, 2020). Selain perempuan-perempuan yang vokal dalam menyampaikan pesan kesetaraan, dibutuhkan kehadiran kaum laki-laki yang mendukung secara penuh akan feminisme yang berangkat dari kesadaran bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengakhiri segala bentuk permasalahan gender yang ada. Ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme yang kian berkembang mampu untuk menghadirkan kesadaran kepada sebagian kaum laki-laki bahwa penindasan yang dialami oleh perempuan merupakan penindasan terlama dan paling mendasar dalam sejarah kehidupan manusia (Larasati, 2019). Hadirnya gerakan Laki-Laki Baru yang didirikan oleh Nur Hasyim merupakan contoh konkrit kontribusi kaum laki-laki dalam menyudahi fenomena ketimpangan gender. Namun gerakan dari kalangan laki-laki yang mengatasmakan kesetaraan gender atau feminisme, tidak selalu disambut baik oleh sebagian kalangan perempuan feminis. Seperti Simone De Beauvoir yang menyebutkan bahwa laki-laki tidak bisa ikut serta dalam gerakan-gerakan feminisme lantaran hanya perempuan yang dapat merasakan secara langsung dan memahami penderitaan kaumnya sendiri (Simaibang & Bajari, 2009).

Nur Hasyim sebagai pendiri gerakan Laki-Laki Baru dalam esai Larasati (2020), mengungkapkan bahwa maskulinitas merupakan konstruksi sosial yang sangat lekat dengan laki-laki. Maskulinitas memuat norma yang harus diikuti setiap laki-laki dengan berbagai konsekuensi di dalamnya. Namun disebutkan juga bahwa maskulinitas bukan merupakan suatu konsep yang tunggal dan bisa berbeda antara suatu budaya dengan budaya lainnya, dapat berkembang dari waktu ke waktu dan berubah-ubah menyesuaikan siklus yang terjadi dalam masyarakat. Namun, sifat maskulin juga dapat dipertukarkan dan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, yang artinya, sifat maskulin tidak hanya dapat dimiliki oleh kaum laki-laki, tetapi juga dapat dimiliki oleh perempuan, begitu juga sifat feminin yang dapat ditunjukkan oleh laki-laki, dan tidak selalu berasal dari perempuan. Konsep maskulinitas inilah yang membuat lelaki mengharuskan dirinya untuk berkompetisi menjadi dan dianggap kuat demi memenuhi ekspektasi sosial lingkungan mereka, sehingga kondisi tersebut lambat laun mengkonstruksi bahwa laki-laki berperan sebagai subjek dan perempuan berlaku sebagai objek (Larasati, 2019). Hal inilah yang sangat memungkinkan adanya pemakluman dari masyarakat dan laki-laki itu sendiri untuk memperlakukan perempuan ataupun sesama laki-laki sebagai hal yang harus dikuasai maupun ditaklukan.

Dengan adanya konstruksi maskulinitas dalam masyarakat, memicu hadirnya gerakan dari Aliansi Laki-Laki Baru untuk turut menyuarkan hak-hak perempuan. Sebagaimana yang

disebutkan dalam tulisan Arivia, gerakan aliansi laki-laki baru menuangkan aktivitasnya kedalam berbagai bentuk yang bersifat pemberdayaan dan aksi protes terhadap pemerintah Indonesia. selain itu juga, aliansi laki-laki baru mencakup dua wilayah kerja, antara lain merupakan wilayah rural dan wilayah urban, yang dimana mereka berusaha melakukan pendekatan dan pergerakan terhadap wilayah-wilayah tersebut. *Voluntarisme* atau kerelawanan merupakan salah satu gerakan yang dilakukan dan sejauh ini gerakan tersebut memiliki lebih dari seratus orang dari kalangan gender apapun, entah itu lelaki, perempuan, LGBTIQ dan lainnya yang tersebar di kota-kota besar termasuk Jakarta. Sejak didirikannya pada tahun 2019, Aliansi Laki-Laki baru mendeklarasikan bahwa posisi mereka adalah untuk gerakan perempuan dengan permasalahan gender dan isu keadilan gender di Indonesia, atau juga dapat dikatakan bahwa Aliansi Laki-Laki baru merupakan orang-orang yang dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan. Gerakan ini hadir didasari oleh keinginan untuk membantu gerakan yang dilakukan perempuan dalam upaya kesetaraan gender, keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan (Larasati, 2019).

Feminis tidak seharusnya hanya menjadi gerakan yang dilakukan perempuan, mengingat feminis bertujuan untuk menciptakan dunia tanpa opresi, dominasi, diskriminasi dan kekerasan. Ini artinya baik perempuan ataupun laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya, karena feminis berbicara soal kemanusiaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebab dari kesetaraan gender itu sulit dibicarakan adalah karena masyarakat sudah tidak dapat berlaku adil sejak dalam pikiran, maskulin dan feminin yang mereka konstruksikan akhirnya menyulitkan diri sendiri karena terjebak dalam kurungan patriarki. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa patriarki tidak hanya menyebabkan ketidak-adilan bagi perempuan dengan gerak yang dipersempit, namun juga membuat laki-laki terpaksa mendominasi dalam segala aspek kehidupan, yang sebetulnya mereka tidak dapat menangani setiap persoalan seorang diri, hingga muncul perasaan terbebani oleh tuntutan gender yang mendorong laki-laki harus dapat melakukan segala hal dan selalu berada jauh di depan perempuan, jika mereka gagal maka akan menerima julukan sebagai laki-laki lemah. Maka pernyataan ini akan terdengar relevan mengapa perempuan dibatasi gerak langkahnya, yaitu agar patriarki tidak mati.

Maka untuk melepaskan diri dari patriarki yang menindas ini, laki-laki perlu berkontribusi dalam gerakan menyadarkan masyarakat tentang kesetaraan gender. Jika para perempuan bergerak menciptakan kesadaran anti ketertindasan di kalangan perempuan, maka tugas gerakan yang diinisiasi oleh kaum laki-laki seperti Aliansi Laki-Laki Baru ini memberi dukungan dengan menyadarkan kaumnya agar memiliki sudut pandang kesetaraan gender. Melihat perempuan bukan sebagai objek maupun lebih rendah posisinya dari laki-laki, melainkan melihat keduanya sebagai manusia yang utuh. Sesama laki-laki dapat saling mengingatkan untuk tidak berlaku kekerasan pada perempuan, dan agar memiliki sikap suportif pada setiap kemajuan yang dilakukan perempuan, sehingga mereka dapat sama-sama kuat sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat dengan segala tuntutan (Muttaqin, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam perjalanannya, feminis berupaya untuk mewujudkan dunia tanpa opresi, dominasi, diskriminasi dan kekerasan. Pada awalnya feminis memang sebuah gerakan yang bergerak untuk keberlangsungan hidup perempuan dari masa ke masa yang harus menghadapi stereotipe merugikan bagi kaumnya tersebut, kemunduran hingga ketertindasan menjadi alasan mengapa perempuan harus melawan. Melalui catatan sejarah telah banyak tokoh perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender, dan masih dilanjutkan hingga hari ini. Namun pada kenyataannya kesetaraan gender tidak hanya dibutuhkan oleh perempuan, karena budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan pun merasa dirugikan. Laki-laki dituntut menjadi tumpuan hidup dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mereka hidup untuk memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai makhluk kuat yang dapat melakukan segala hal, dan akan rentan mengalami penolakan oleh masyarakat di saat mereka 'gagal' memenuhi ekspektasi-ekspektasi tersebut.

Di Indonesia, kesetaraan gender sendiri belum sampai pada puncak perjuangan, masyarakat masih saja berdebat dengan persoalan tentang peran perempuan yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan gender sulit dicapai karena ada sebagian perempuan yang memang menolaknya. Kemelut patriarki dan doktrin agama bercampur menjadi tameng bagi sebagian perempuan ketika diberitahu tentang perlunya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Misi kesetaraan gender pun memiliki PR besar saat harus berhadapan dengan pemikiran denial yang menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan selalu berada dalam kekuasaan laki-laki serta pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki tidak perlu setara, karena perempuan telah dimuliakan oleh agamanya. Padahal ketidakmampuan seseorang dalam membaca situasi yang tidak adil berakibat pada tindak kekerasan.

Maka dari itu, gerakan feminis tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Seharusnya tidak ada sebutan feminis perempuan dan feminis laki-laki, yang ada hanyalah feminis. Karena mewujudkan kesetaraan adalah tanggung jawab semua manusia tanpa memperhitungkan gender. Laki-laki dan perempuan berhak memperjuangkan hak dan keinginannya, serta diperhitungkan keberadaannya sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai laki-laki ataupun perempuan itu sendiri. Aliansi Laki-laki Baru adalah salah satu organisasi pergerakan yang mendukung feminisme di Indonesia, dengan tugas utamanya menyebarkan kesadaran akan budaya patriarki yang telah lama membelenggu dengan cara mengingatkan sesama laki-laki untuk memiliki sudut pandang kesetaraan dalam dirinya, sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan tindak kekerasan dan dominasi baik terhadap perempuan ataupun sesama laki-laki.

Daftar Pustaka

- Arivia, G. (2020, Mei 11). *Wacana Feminis*. Retrieved Januari 1, 2021, from Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan: <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-dan-covid-19>
- Armiyati, L. (2015, November). *Chapter*. Retrieved Januari 1, 2021, from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/312796881_PEREMPUAN_BERJUANG_BUKAN_MENANTANG_STUDI_GERAKAN_PEREMPUAN_INDONESIA
- Baudrillard, J. P. (2011). *Masyarakat Konsumsi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar*, No. 3, 284-300.
- Djulkarnain, I. (2015). Kuasa Tubuh Atas Perempuan: Tela'ah Kritis Terhadap Gerakan Sosial Gender. *Prosiding Seminar Nasional Gender and Development* (pp. 1-17). Madura: Puslit Gender dan Kependudukan LPPM UTM.
- Kiranantika, A. (Ed.). (2020). *Perempuan, Anak dan Keluarga Dalam Arus Perubahan*. Nas Media Pustaka.
- Kiranantika, A. (2020). Arising in Migration: Forming a Power through Connectivity for Javanese Women. *KnE Social Sciences*, 312-327.
- Kristeva, N. S. (2015). *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larasati, I. (2019). Gerakan Aliansi Laki-laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas untuk Mewujudkan Keadilan Gender. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No.2, 211-220.
- Mardiasih, K. (2019). *Muslimah yang Diperdebatkan*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Mustikawati, C. (2015). PEMAHAMAN EMANSIPASI WANITA (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R. A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang). *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 3, No. 1, 65-70.

- Muttaqin, F. (2014, September 22). *Wacana*. Retrieved Januari 8, 2021, from Aliansi Laki-Laki Baru: <https://lakilakibaru.or.id/feminis-laki-laki-atau-feminis-saja/>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Schiele, K., Louie, L., & Chen, S. (2020). Marketing feminism in youth media: A study of Disney and Pixar animation. *Business Horizons Elsevier*, 659-669.
- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No.1, 33-42.
- Simaibang, E. W., & Bajari, A. (2009). Representasi Male Feminist oleh Aliansi Laki-laki Baru di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Laki-laki Feminis oleh Aliansi Laki-laki Baru di Twitter @lakilakibaru). *Linimasa Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-21.
- Syaifudin, A. (2020). *Penjara Perempuan*. Sukoharjo: Diomedia.
- Wieringa, S. (1988). *The Perfumed Nightmare*. Den Haag: International Institute of Social Studies.